



BPK Kalbar Panen Temuan

- 4.595 Temuan
Senilai Rp814,24 M
- 10.806 Rekomendasi
Senilai Rp531,95 M

PONTIANAK - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat

(BPK Kalbar) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah, dan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) pada semester II Tahun Anggaran (TA) 2019 di Aula Kantor BPK Kalbar, kemarin. Dalam pemantauan TLRHP, terdapat 4.595 temuan pemeriksaan

senilai Rp814,24 miliar dan dihasilkan 10.806 rekomendasi senilai Rp531,95 miliar.

Gubernur Kalbar, para bupati, wali kota, ketua DPRD, inspektorat, Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (BPD Kalbar), dan Direktur PDAM Tirta Khatulistiwa diundang dalam acara ini.



Joko Agus Setyono
Kepala Perwakilan BPK Kalbar

Laporan diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK Kalbar, Joko Agus Setyono. Laporan itu terdiri dari lima LHP kinerja dan empat LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT). Sementara Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Pemantauan TLRHP diserahkan kepada 15 entitas.

"Pemeriksaan kinerja

bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomi (aspek 3E) pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah," ujar Joko sebagaimana disiarkan Subbagian Humas dan TU Kaban BPK Kalbar melalui situs www.pontianak.bpk.go.id.

Pada periode ini, pemeriksaan kinerja meliputi bidang penyediaan air

minum pada PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak. Bidang pendidikan yakni menyangkut peningkatan kualitas pembelajaran melalui penjaminan mutu dan implementasi kurikulum dalam mewujudkan terselesainya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah

◆ Ke Halaman 7 kolom 1

BPK Kalbar Panen Temuan

Sambungan dari halaman 1
Kabupaten Sanggau dan Sekadau.

Bidang kesehatan yaitu pengelolaan dan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar pada Pemerintah

Kota Pontianak dan Singkawang. Hasil dari pemeriksaan menunjukkan kinerja PDAM Tirta Khatulistiwa dan

kinerja bidang kesehatan Pemkot Pontianak dinilai cukup efektif. Sementara kinerja bidang pendidikan Pemkab



Sanggau, Sekadau dan kinerja bidang kesehatan Pemkot Singkawang dinilai kurang efektif.

Untuk pemeriksaan DTT, pada periode ini meliputi pemeriksaan pengelolaan kredit segmen menengah dan korporasi serta beban operasional dan nonoperasional PT. BPD Kalbar. Pemeriksaan belanja daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Pemkab Kubu Raya, dan Pemkab Landak.

Hasil dari pemeriksaan pada PT. BPD Kalbar menunjukkan bahwa terdapat penyaluran fasilitas kredit yang tidak sesuai ketentuan dan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian. Sementara penetapan nilai dan realisasi remunerasi direksi dan komisaris tidak didukung keputusan RUPS dan atau dewan komisaris.

Untuk hasil pemeriksaan atas belanja daerah ditemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan atas proses pengadaan barang atau jasa, penetapan alokasi insentif, pengelolaan dan hibah bantuan sosial, dan pembayaran honorarium. Ada juga kekurangan volume dan

keterlambatan penyelesaian pekerjaan serta belum dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Dalam pemantauan TL-RHP, terdapat 4.595 temuan pemeriksaan senilai Rp814,24 miliar dan dihasilkan 10.806 rekomendasi senilai Rp531,95 miliar. Atas rekomendasi tersebut, kata Joko, sebanyak 8.742 rekomendasi atau 80,90 persen telah ditindaklanjuti dan telah sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 65 rekomendasi atau 0,60 persen tidak dapat ditindaklanjuti. Sementara sisanya, sebanyak 1.999 rekomendasi atau 18,50 persen masih dalam proses tindak lanjut maupun belum ditindaklanjuti dari entitas terkait.

Selain laporan-laporan di atas, BPK Perwakilan Kalbar juga menerbitkan Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah (LPPKD). Dari hasil pemantauan ditemukan masih terdapat kelemahan. Antara lain belum adanya skema penyelesaian kerugian daerah yang mampu memberikan informasi jumlah dan nilai kasus kerugian. Belum adanya data pemantauan penyelesaian kerugian daerah dan kurang aktifnya

upaya penanganan kerugian daerah.

"Kurang aktifnya upaya penanganan tersebut menyebabkan penanganan menjadi tidak kunjung terselesaikan. Atas permasalahan tersebut, BPK Kalbar menyarankan agar membuat skema penyelesaian kerugian daerah," sarannya.

Penanganan hendaknya dilakukan secara lebih aktif. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelesaian kasus, dan meningkatkan kualitas data yang digunakan memantau dan mengevaluasi penanganan kerugian daerah.

Menjelang akhir tahun 2019, Joko menyebutkan bahwa BPK Kalbar mengingatkan dan berharap agar pemerintah daerah dapat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 secara tepat waktu. Caranya dengan penyajian sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan perundang-undangan berlaku. Inspektorat/Bawasda juga hendaknya sudah melakukan revisi sebelum laporan diserahkan kepada BPK Kalbar. *(den)*